



DPRD DIY Usulkan Tambahan Asuransi Nakes dan Relawan Covid-19

YOGYA, TRIBUN - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY mengusulkan tambahan asuransi untuk tenaga kesehatan (nakes) dan relawan yang menangani Covid-19. Hal ini lantaran pekerjaan nakes dan relawan Covid-19 berisiko tinggi.

Usulan itu disampaikan Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto, saat dijumpai di ruang paripurna DPRD DIY, Senin (7/3). Menurutnya, nakes dan relawan perlu mendapat jaminan sosial maupun jaminan kesehatan yang layak.

Untuk merealisasikan usulan tersebut perlu adanya dukungan anggaran, yang dalam hal ini dapat diambil dari belanja tak terduga (BTT) di APBD DIY 2022. "Sampai hari ini kasus covid di DIY masih tinggi dan tren penggunaan

bed rumah sakit juga mengalami kenaikan. Bahkan, angka kematian juga meningkat, dengan rata-rata 20 orang sejak empat hari terakhir," katanya.

Eko menjelaskan, pemerintah DIY memiliki anggaran tak terduga sebesar Rp94,7 miliar.

Selain untuk membantu penanggulangan bencana alam termasuk siaga Merapi dan dampak bencana lainnya, dana tersebut dapat digunakan untuk dampak penanggulangan covid-19.

Tidak hanya di pemerintah DIY, tetapi di kabupaten/kota juga memiliki anggaran yang serupa dengan yang berbeda-beda sesuai dengan yang telah mereka tetapkan di APBD. Di Kabupaten Gunungkidul tersedia dana Rp48,3 miliar, Kota Yogyakarta Rp56,3 miliar, Kabupaten Kulonprogo Rp21,3

miliar, Kabupaten Sleman Rp52,5 miliar dan Kabupaten Bantul Rp 5,7 miliar.

"Jadi seharusnya itu dapat direalisasikan. Minggu ini kami akan panggil Dinas terkait untuk membahas usulan ini," jelasnya.

Wakil Ketua Satgas Covid-19 DIY Biwara Yuswantana menjelaskan, usulan penambahan asuransi bagi para nakes dan relawan Covid-19 perlu dikaji lebih mendalam. Sebab menurutnya, para relawan di TRC BPBD DIY yang resmi dan terdaftar baik itu berstatus Tenaga Bantu (Naban) maupun ASN sudah mendapat asuransi. "Kalau di kami itu mereka sudah dapat. Begitu juga para nakes yang bekerja di instansi formal tentunya mereka juga sudah dapat. Jadi untuk usulan itu perlu dikaji ulang," ungkapnya. **(hda)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005